

IMPLEMENTASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN UMKM (STUDI PADA BANK BSI KCP SUMENEP)

Ahmad Zaki Fuadi¹, Mujibno²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan Sumenep

Email Korespondensi: fuadieahmad21@gmail.com

Email: mujibship@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the People's Business Credit (KUR) at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sumenep and its impact on increasing the income of micro, small, and medium enterprises (UMKM). BSI was appointed by the government as the KUR distributor in 2023, offering KUR Super Micro, KUR Micro, and KUR Small programs using the murabahah contract with a 6% margin, providing financing from 1 million to 500 million rupiah. This study employs a qualitative method, with primary and secondary data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity is ensured through triangulation techniques. The results indicate that KUR implementation at BSI KCP Sumenep is carried out through working capital and investment financing for businesses that have been operating for at least six months with good collectibility. Factors contributing to increased income include the entrepreneur's ability, market conditions, capital, organizational structure, and advertising. The study concludes that KUR serves as an important instrument in supporting UMKM growth by enhancing access to capital and business capabilities.

Keywords: People's Business Credit, Bank Syariah Indonesia, UMKM, Capital Financing, Murabahah, Income Improvement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sumenep dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan UMKM. BSI ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur KUR tahun 2023 dengan program KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil menggunakan akad murabahah dengan margin 6%, memberikan pembiayaan modal mulai dari 1 juta hingga 500 juta rupiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin dengan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUR di BSI KCP Sumenep dilakukan melalui pembiayaan modal kerja dan investasi bagi usaha yang telah berjalan minimal enam bulan dengan kolektibilitas lancar. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasabah meliputi kemampuan pelaku usaha, kondisi pasar, modal, kondisi organisasi usaha, dan periklanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUR menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui peningkatan akses modal dan kemampuan usaha.

Kata kunci: Kredit Usaha Rakyat, Bank Syariah Indonesia, UMKM, Pembiayaan Modal, Murabahah, Peningkatan Pendapatan.

PENDAHULUAN

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang secara resmi berdiri pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko

Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia ini di Istana Negara. BSI merupakan hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 (Sejarah Perseroan BSI, 2023)

Saat ini, BSI ditunjuk sebagai lembaga keuangan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023 (Windi Andini, 2022). Penyaluran KUR oleh BSI membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman tanpa bunga, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menetapkan suku bunga. Pembiayaan KUR di BSI menggunakan mekanisme akad murabahah sehingga nasabah dapat memperoleh pinjaman tanpa riba (Syahrir, 2020).

BSI menyediakan tiga jenis KUR, yakni KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. KUR Super Mikro ditujukan untuk pemenuhan modal kerja dan investasi UMKM dengan plafon maksimal Rp10 juta, KUR Mikro untuk pembiayaan modal kerja dan investasi dengan plafon antara Rp10 juta sampai Rp50 juta, dan KUR Kecil untuk modal kerja dan investasi dengan plafon Rp50 juta sampai Rp500 juta (Syahrir, 2020). Syarat peminjaman KUR BSI mencakup kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo, usaha produktif minimal berjalan 6 bulan, memiliki surat keterangan usaha atau SIUP, NPWP untuk pinjaman di atas Rp50 juta, dokumen jaminan sesuai plafon, serta dokumen pendukung seperti fotokopi KTP suami-istri, kartu keluarga, buku nikah, dan pas foto 4x6 (Syahrir, 2020).

KUR merupakan program pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan terjamin. Program ini bertujuan memperkuat permodalan badan usaha dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM (Pandipa, 2019). Program KUR resmi diluncurkan pada 5 November 2007 berdasarkan Surat Edaran No. 6 Tahun 2007 (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007), dengan dana berasal dari bank atau lembaga keuangan yang menyalurkan KUR untuk modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan atau belum bankable (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007). Usaha produktif menghasilkan barang atau jasa untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha, usaha layak (feasible) memberikan laba yang cukup untuk membayar bunga dan pokok kredit, sedangkan usaha yang belum bankable belum dapat memenuhi persyaratan perbankan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007). Tujuan program KUR adalah mempercepat pengembangan kegiatan ekonomi sektor riil, mengentaskan kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007). KUR sebagai pinjaman pemerintah untuk UMKM dikelola bank bertujuan memperbaiki perekonomian nasional (Dudin, 2018). Program ini memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian rakyat dan bisnis perbankan, serta meningkatkan keuntungan pedagang setelah memperoleh KUR (Leksana, 2017).

Nasabah merupakan aset utama perusahaan karena tanpa nasabah, perusahaan tidak dapat beroperasi (Kasmir, 2013; IBI & LSPP, 2013). Istilah “nasabah” digunakan pada lembaga keuangan seperti bank, asuransi, atau pegadaian, sementara “pelanggan” lebih umum pada jasa non-keuangan, meski keduanya memiliki arti serupa (Kasmir, 2013; IBI & LSPP, 2013). Nasabah penyimpan menempatkan dana di bank sesuai perjanjian, sedangkan nasabah debitur memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan syariah (Kasmir, 2013; IBI & LSPP, 2013). Fokus bank selalu diarahkan pada kepuasan nasabah untuk mencapai pertumbuhan bisnis dan profitabilitas (Kasmir, 2013; IBI & LSPP, 2013).

Perkembangan jumlah nasabah KUR BSI KCP Sumenep menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2021 tercatat 305 nasabah, 2022 meningkat menjadi 635 nasabah, dan 2023 mencapai 800 nasabah (Dhita Pratiwi Ar dkk., 2022). Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan nasabah KUR BSI KCP Sumenep dari tahun ke tahun. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Implementasi Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Peningkatan Pendapatan UMKM (Studi Pada BSI KCP Sumenep)” untuk menganalisis dampak penyaluran KUR terhadap pendapatan UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokusnya pada pemahaman mendalam mengenai implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BSI KCP Sumenep dan peningkatan pendapatan UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan pengumpulan data langsung dari responden serta pengamatan fenomena yang terkait (Creswell, 2010; Zucri, 2021). Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan pasif, hadir di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data tanpa ikut serta dalam kegiatan subjek penelitian. Lokasi penelitian dipilih di BSI KCP Sumenep, Labangseng, Kota Sumenep, Jawa Timur, karena strategis dan relevan dengan fokus penelitian (Zucri, 2021). Sumber data terdiri dari data primer, diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan bagian marketing, nasabah, serta pihak terkait BSI KCP Sumenep, dan data sekunder, yaitu dokumen, buku, foto, karya ilmiah, brosur, statistik, serta website resmi yang relevan (Edi Subroto, 1992; Farida Nugrahani, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, untuk memastikan data akurat dan lengkap. Observasi dilakukan untuk mencatat perilaku objek, wawancara bertujuan memperoleh informasi yang tidak bisa diamati, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai pelengkap (Eko Murdiyanto, 2020).

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilih, mengelompokkan, dan menyaring informasi, penyajian data berupa teks naratif, matriks, grafik, atau bagan untuk memudahkan interpretasi, dan kesimpulan diambil berdasarkan konfirmasi makna data (Creswell, 2010; Eko Murdiyanto, 2020). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan melibatkan berbagai informan serta metode pengumpulan data yang berbeda, seperti wawancara dan observasi, untuk memperoleh informasi yang konsisten mengenai implementasi KUR dan dampaknya terhadap UMKM (Zucri, 2021).

Tahap penelitian mengikuti prosedur pra-lapangan, pelaksanaan lapangan, dan analisis intensif. Tahap pra-lapangan meliputi penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lokasi, pengurusan perizinan, pemilihan informan, persiapan alat, dan etika penelitian. Tahap pelaksanaan lapangan mencakup pengamatan, pengumpulan data, dan pemahaman konteks penelitian. Tahap analisis dilakukan dengan mengatur, memilah, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan data untuk mengidentifikasi tema dan hipotesis yang relevan dengan fokus penelitian (Creswell, 2010; Zucri, 2021; Eko Murdiyanto, 2020).

PEMBAHASAN

Penelitian ini menyajikan paparan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sumenep dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Data wawancara diambil dari beberapa informan yang memiliki pengalaman langsung dengan program KUR, baik dari pihak bank maupun nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 01/A/W/IKUR/05/07/2023, KUR dijelaskan sebagai program pemerintah untuk membantu modal pelaku UMKM. Informan menyatakan: "KUR ini dek, merupakan sebuah program dari pemerintah yang dimana sebelumnya KUR ini dikeluarkan hanya oleh lembaga keuangan konvensional saja, tapi sekarang BSI juga ditunjuk oleh pemerintah." Program ini menggunakan akad murabahah dengan margin 6%, dengan persyaratan berupa KTP, KK, SIU, NPWP untuk pinjaman di atas 50 juta, dan agunan untuk pembiayaan di atas 100 juta.

Informan 01/A/W/IKUR/05/07/2023 menambahkan: "Pemberian modal KUR ini sangat mudah dek, yang penting pelaku UMKM itu mempunyai usaha yang sudah berjalan 6 bulan. Nanti kita survei/lihat ke tempatnya apakah benar, setelah itu barulah diadakan akad murabahah dengan margin 6%. Untuk persyaratan ada KTP, KK, SIU, dan kalau pembiayaan di atas 50 juta ditambah NPWP, jika lebih dari 100 juta harus ada agunannya seperti BPKB mobil." Hal ini diperkuat oleh nasabah 04/HZ/IKUR/07/12/2023 yang menceritakan pengalamannya pribadinya: "Saya awalnya coba-coba tanya ke mantan saya, bisa nggak

kalau saya ambil KUR di BSI, ternyata bisa. Sebelumnya saya ambil KUR di bank konvensional, jadi ingin mencoba di BSI. Setelah dapat KUR dari BSI enak, karena margin kecil dibanding KUR sebelumnya.”

Bank BSI KCP Sumenep memiliki tiga jenis KUR, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil, dengan minimal pembiayaan mulai dari 1 juta hingga maksimal 500 juta. Jika nasabah ingin melakukan pembiayaan ulang sebelum pelunasan sebelumnya, margin ditambah 1% untuk pembiayaan baru. Informan 02/B/W/IKUR/11/12/2023 menjelaskan: “Untuk KUR, BSI mengeluarkan 3 macam KUR, Super Mikro 1–10 juta, Mikro 10–100 juta, dan Kecil 100–500 juta. Jika nasabah ingin meminjam lagi, margin ditambah 1%.”

Jangka waktu pembiayaan fleksibel sesuai jenis KUR. Informan 03/C/W/IKUR/11/12/2023 menjelaskan: “Untuk jangka waktunya, terserah nasabah ingin mengambil yang berapa, tapi minimal 3 bulan. Setiap KUR ada maksimal jangka waktu: KUR kecil maksimal 48 bulan, sedangkan KUR mikro dan super mikro maksimal 36 bulan.” Sebelum pencairan, bank melakukan pengecekan BI-Checking dan blacklist nasabah untuk mengurangi risiko kredit macet, sebagaimana dijelaskan oleh informan 01/A/W/IKUR/05/07/2023: “Sebelum nasabah bisa mendapatkan pembiayaan modal, kami akan melakukan pengecekan apakah nasabah tersebut pernah masuk daftar hitam atau Blacklist.” Informan 06/D/W/IKUR/07/11/2023 menambahkan: “Kalau telat angsuran, uang nasabah disimpan di bank, digunakan sementara untuk membayar, lalu dikembalikan setelah angsuran dibayar.”

Mengenai peningkatan pendapatan UMKM, informan 01/A/W/PPU/11/12/2023 menyampaikan: “Semua nasabah yang saya temui setelah mendapatkan penyaluran modal KUR pendapatan mereka meningkat semua, dan mereka amanah dalam mengelola modal.” Nasabah 05/AB/W/15/12/2023 menambahkan: “Kalau modal digunakan untuk usaha pasti meningkat, beda kalau buat bayar hutang. Saya usaha perlengkapan sekolah dan perlengkapan lain, pendapatan meningkat di hari-hari ramai seperti awal tahun ajaran dan hari raya.” Faktor lain yang memengaruhi peningkatan pendapatan termasuk kerja keras, semangat, dan kondisi harga pasar. Informan 05/AB/W/11/12/2023 menyebutkan: “Yang penting kita bekerja keras, giat, dan semangat dalam berusaha. Orang pengusaha pasti ada naik turunnya pendapatan.” Sedangkan informan 06/SC/W/07/12/2023 menambahkan: “Selain pembiayaan, harga sembako yang naik meningkatkan keuntungan.”

Hasil observasi menunjukkan prosedur penyaluran KUR dilakukan secara sistematis, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi dokumen, rapat komite, survei lokasi, hingga akad perjanjian dan pencairan. Observasi pertama dilakukan pada 5 Juli 2023, dan observasi lanjutan pada 18 September 2023, termasuk pengecekan website resmi BSI mengenai KUR. Observasi mengonfirmasi bahwa prosedur ini efektif dalam meminimalisir risiko kredit macet dan memastikan penggunaan dana sesuai tujuan. Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data di lapangan, terdapat beberapa aspek penting yang dapat dibahas terkait implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengaruhnya terhadap pendapatan UMKM.

Pertama, implementasi KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sumenep merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan program pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Bank BSI menyalurkan pembiayaan modal kerja dan investasi kepada pelaku UMKM yang usahanya telah berjalan minimal enam bulan. Penyaluran pembiayaan ini menggunakan akad murabahah dengan margin 6% untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu, bank menetapkan beberapa persyaratan penting bagi calon nasabah, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pinjaman di atas 50 juta rupiah, serta agunan bagi pinjaman di atas 100 juta rupiah. Sebelum pembiayaan diberikan, pihak bank melakukan pengecekan BI-Checking untuk menilai kolektibilitas nasabah agar terhindar dari risiko kredit macet, sehingga pembiayaan dapat disalurkan secara aman dan tepat sasaran.

Kedua, terkait peningkatan pendapatan UMKM setelah mendapatkan penyaluran KUR, penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan modal dari BSI memiliki pengaruh signifikan apabila digunakan dengan tepat untuk pengembangan usaha. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 dan TAP MPR No.

XVI/MPR-RI/1998 yang menekankan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian integral dari ekonomi rakyat. UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan berkeadilan, sehingga modal yang disalurkan melalui KUR harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan UMKM antara lain kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya, kondisi pasar yang memengaruhi permintaan produk atau jasa, ketersediaan modal untuk operasional, struktur organisasi usaha yang mendukung kelancaran kegiatan, serta strategi periklanan dan promosi yang efektif. Dengan pemanfaatan modal yang optimal dan strategi pengelolaan yang tepat, UMKM dapat memaksimalkan pendapatannya sehingga tujuan program KUR untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM dapat tercapai.

Selain itu, penelitian juga menekankan pentingnya penggunaan modal KUR secara tepat dan produktif. Jika modal yang diterima tidak digunakan untuk kegiatan usaha, misalnya untuk membayar hutang atau keperluan pribadi, maka dampak terhadap peningkatan pendapatan UMKM akan minimal. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan KUR tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kemampuan nasabah dalam memanfaatkan modal tersebut secara efektif.

Lebih lanjut, penerapan sistem monitoring oleh BSI, seperti survei lokasi usaha, pengecekan dokumen pendukung, dan BI-Checking, membantu bank dalam menilai kelayakan calon nasabah serta mengurangi risiko kredit macet. Prosedur ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada UMKM yang produktif dan memiliki kapasitas untuk mengelola modal dengan baik.

Selain aspek teknis, penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan UMKM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kondisi pasar dan fluktuasi harga barang. Misalnya, kenaikan harga sembako atau permintaan musiman dapat memberikan peluang peningkatan keuntungan bagi pelaku usaha yang telah memanfaatkan modal KUR dengan baik.

Selanjutnya, aspek internal usaha, seperti keterampilan manajerial, inovasi produk, dan efisiensi operasional, juga menjadi faktor penentu keberhasilan penggunaan modal KUR. UMKM yang memiliki kemampuan internal lebih baik cenderung mampu memanfaatkan pembiayaan untuk memperluas usaha, meningkatkan produktivitas, dan menumbuhkan keuntungan lebih besar dibandingkan UMKM yang kurang terorganisasi.

Kesimpulannya, implementasi KUR oleh Bank BSI KCP Sumenep tidak hanya menyediakan akses modal yang diperlukan oleh UMKM, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan mereka. Keberhasilan program ini tergantung pada kesesuaian akad, kelengkapan persyaratan, efektivitas monitoring bank, pemanfaatan modal oleh pelaku usaha, serta kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi usaha. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, KUR terbukti menjadi instrumen strategis untuk pemberdayaan UMKM dan pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sumenep dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan modal kerja dan investasi kepada para nasabah. Penyaluran pembiayaan ini diberikan kepada pelaku UMKM yang usahanya telah berjalan minimal enam bulan dan memiliki kolektibilitas yang lancar, sehingga risiko kredit macet dapat diminimalkan. Dalam proses pembiayaan, bank menggunakan akad murabahah, sesuai dengan prinsip syariah, untuk memastikan seluruh transaksi berjalan secara halal dan transparan.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan nasabah setelah menerima pembiayaan KUR. Faktor-faktor tersebut mencakup kemampuan dan keterampilan pelaku usaha dalam mengelola usahanya, kondisi pasar yang memengaruhi permintaan produk atau jasa, jumlah modal yang tersedia untuk menjalankan usaha, kondisi organisasi

usaha yang mendukung kelancaran operasional, serta strategi periklanan dan promosi yang efektif. Kombinasi dari faktor-faktor ini memungkinkan nasabah memanfaatkan modal KUR secara optimal sehingga pendapatan usaha mengalami peningkatan yang signifikan.

REFERENSI

- A. J. M. Chandra dasa, "Impact of Microfinance on Multi-dimensions of the Women Empowerment: A Case Study of Sothern Sri Lanka" (Sri Lanka : University of Ruhuna Sri Lanka, 2020).
- Andini, Windi. "Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 2, no. 1 (13 April 2022): 221–30. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.68>.
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2024), diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2024 pada jam 20.00 WIB.
- Creswell, John W. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi terjemahan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar., 2010.
- Deo Pratama Jhon Fernos, "Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Nagari Cabang Padang," 2019.
- Eko Murdiyanto. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai contoh proposal)*. Edisi I. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press., 2020.
- Edi Subroto, *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press, 1992).
- Farida Nugrahani, M.Hum. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 2014.
- Haryana, Gani. 2014. "Analisis Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Bank Bri Unit Tabek Patah Cabang Batusangkar Sumatera Barat."
- Ismaulina, Ismaulina, Desi Misra Resa, dan Syafril Nasution. "Peningkatan Pendapatan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah dan Pemberdayaan." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 10, no. 2 (21 Desember 2022): 325. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i2.13739>.
- Jhon Fernos, Deo Pratama. "Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Nagari Cabang Padang." 2019, t.t.
- KUR Maksud Dan Tujuan <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> (diakses pada tanggal 18 juli 2023, jam 12.13).
- Muhammad Rifky Bayhaqi, "Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Syariah KCP Bojonegoro Pada UMKM Di Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro" (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Riri Novalina Peronica, *Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*" (Medan : Universitas Medan Area, 2020).
- Sarath, H.K. , Atapattu, D, Sumanaratne, B. M. , "Investigating Household Poverty Determinants of The Micro, Small and Medium Enterprise Sector in Rural Sri Lanka" (Sri Lanka : University of Ruhuna Sri Lanka, 2020).
- Shinta Dellyana Saputri, *Implementasi Pembiayaan BSI KUR Dalam Pengembangan UMKM di Lampung Tengah Pada Masa Pandemi Covid-19* (Lampung Tengah : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).
- Syahrir Ika, "Kredit Usaha Rakyat (KUR): 'Indonesian Way' Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia," *Sejarah Perseroan BSI* https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pada jam 14.30 WIB.
- Subroto, Edi. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press, 1992.
- Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pembangunan Real Estat dan Pemberdayaan UMKM.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 1 Januari 2026

Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/a8151e21-cedc-4fa0-bd2b-501fc48916ff> (diakses pada tanggal 3 Desember 2023, pada jam 09.30).

Widiastuti, Rahayu. 2017. "Apakah Kredit Usaha Rakyat (Kur) Berdampak Pada Kinerja Usaha (Studi Pada Umkm Makanan Ringan Di Kota Salatiga)." Jurnal Visi Manajemen 2.

Zucri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, 1st ed. (CV. Syakir Media Press, 2021).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

129

